



### EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UNU KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

**Siska Mahmud<sup>1</sup>, Ni Luh Titi Indayani<sup>2</sup>**

Ilmu Pemerintahan<sup>1</sup>, Ilmu Administrasi Negara<sup>2</sup>, Universitas Tompotika Luwuk

Email: [siska.mahmud@gmail.com](mailto:siska.mahmud@gmail.com), [niluhyani48@gmail.com](mailto:niluhyani48@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini di dasari oleh keingintahuan peneliti terhadap pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang di gunakan purposive sampling, jumlah informan 10 orang. Teknik pengumpulan data di ambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudian di jelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat masih kurang maksimal atau belum di katakan efektif. Di lihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan dana desa dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah di sepakati dalam musyawarah desa, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, serta penyusunan RKPDes dan APBDes. Ada beberapa hal yang membuat pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kurang maksimal yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat desa unu serta masih kurangnya sumber daya manusia dari sebagian aparat desa dan kurangnya pengawasan dari pemerintah desa terhadap pelaksanaan program kegiatan.

**Kata kunci:** Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan, Masyarakat

#### **Abstract**

This study aims to determine the effectiveness of village fund management in the Implementation of Community Empowerment in Unu Village, South Bulagi District, Banggai Islands Regency. This research is based on the researcher's curiosity about the management of village funds for the implementation of community empowerment. This research is descriptive qualitative research using purposive sampling, with a total of 10 informants. The data collection techniques used were interviews and observation, which were then described descriptively to obtain valid and accountable research results. The results of this study can be concluded that the effectiveness of village fund management in the implementation of community empowerment is still not optimal or cannot be said to be effective. This can be seen from the planning, organization, implementation, and

supervision. The village government has implemented village fund management by following the rules that have been agreed upon in village deliberations, starting from hamlet deliberations, village deliberations, and the preparation of the RKPD and APBDes. There are several things that make the management of village funds in the implementation of community empowerment less than optimal, namely the lack of participation from the village community, the lack of human resources from some village officials, and the lack of supervision from the village government over the implementation of activity programs.

**Keywords:** Effectiveness, Village Funds, Empowerment, Community

## **Pendahuluan**

Pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memulai inisiatif dari dalam, membangun kemandirian, memperbaiki lingkungan, dan mengembangkan usaha lokal. Pemberdayaan masyarakat juga mencakup kegiatan yang membantu masyarakat menjadi lebih berdaya dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memproduksi lebih banyak. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas masyarakat, terutama dengan mengubah perilaku mereka untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menemukan potensi mereka sendiri dan mengambil tindakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tujuan utamanya adalah untuk menginspirasi dan membangkitkan kemampuan masyarakat, terutama di pedesaan, dan salah satu caranya adalah dengan mengelola dana desa dengan baik.

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengubah masyarakat yang belum memiliki kekuatan dan kemampuan menjadi lebih berdaya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari pentingnya memperoleh pengetahuan dan kemampuan, (Nurhayati, 2019). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi masyarakat yang lemah, miskin, dan terpinggirkan secara utuh dan nyata, sehingga mereka dapat mandiri secara sosial ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, (Susanti et al., 2023).

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kata dasar efektif adalah efektif yang artinya tepat sasaran atau dengan kata lain tepat sesuai rencana. Pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena efisiensi menekankan pada hasil yang ingin dicapai, Agung Kurniawan (205:109).

Pengelolaan dapat disederhanakan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis oleh sekelompok orang dalam mengatur dan menjalankan suatu organisasi atau kegiatan. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya dan pembagian tugas, pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta pengawasan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki

oleh anggota kelompok tersebut. Pengelolaan juga meliputi proses perumusan kebijakan dan penetapan tujuan dari sebuah program desa atau kegiatan yang dikelola. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan berupaya merumuskan dan menetapkan arah, sasaran, serta pedoman yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan atau operasional program desa tersebut. Pengelolaan juga mencakup aspek pengawasan, di mana pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, (Fisabilillah et al., 2020).

Untuk memastikan dana desa dikelola secara transparan, adil, dan efektif, pemerintah pusat telah memberikan dana untuk membantu desa berkembang. Dana ini dimaksudkan untuk mendukung dan mendorong pembangunan serta penguatan masyarakat di desa. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang membantu masyarakat bekerja sama dalam melaksanakan proyek pembangunan dan pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat dan bagaimana mereka memandang program-program ini sangat penting untuk mencapai tujuan proyek pemerintah. Keberhasilan program-program ini bukan hanya tentang apa yang dapat dilakukan oleh aparatur pemerintah—tetapi juga bergantung pada kemampuan dan rasa aman masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek tersebut.

Keterlibatan masyarakat dapat membantu menutupi keterbatasan sumber daya dan keterampilan pemerintah dalam melaksanakan program-program ini. Untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan. Pertumbuhan ekonomi diikuti oleh pembangunan desa, yang mencakup pergeseran struktur ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian hingga industri dan jasa, serta pergeseran kelembagaan melalui regulasi dan reformasi kelembagaan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus melibatkan masyarakat desa dalam semua aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam proses perencanaan masyarakat, pemerintah juga berhak untuk mengetahui dan mengawasi proses pembangunan desa. Dana Desa harus dialokasikan dan digunakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Dana Desa adalah program pemerintah yang menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dimana desa tersebut berada. Tujuan utama program ini adalah untuk membangun ekonomi dan mengurangi kemiskinan di desa-desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Dengan adanya dana ini, diharapkan pelayanan publik di desa menjadi lebih baik, pengelolaan keuangan dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel, Teknologi informasi dan komunikasi di desa meningkat, terutama untuk pengelolaan data keuangan desa yang lebih baik, perekonomian desa meningkat, tingkat kemiskinan dapat diturunkan, kesenjangan pembangunan antara desa dapat dikurangi, serta masyarakat desa menjadi lebih berdaya sebagai subjek pembangunan, (Christianingrum, 2022). Dana desa didistribusikan secara merata dan

adil ke setiap desa di setiap kabupaten. Pembagiannya terdiri dari Alokasi Dasar (AD) yang dihitung dengan membagi alokasi dasar per kabupaten dengan jumlah desa. Kemudian ada Alokasi Afirmasi yang diberikan kepada desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi. Selanjutnya, Alokasi Formula disusun berdasarkan data dari kementerian terkait, lembaga statistik, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis, (Indika et al., 2022).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan menggambarkan secara mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang menjadi subyek dalam penelitian adalah pemerintah desa dan masyarakat, di desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang menjadi obyek penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Data primer diperoleh dari sumber asli atau pertama, seperti observasi lapangan atau wawancara langsung. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung seperti dokumen, laporan, atau data yang sudah tersedia sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas, hingga data menjadi jenuh. Selama pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi, beserta beberapa alat pendukung, (Miles & Huberman, 2014).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan**

Efektivitas merupakan suatu ukuran atau capaian nyata yang menyatakan seberapa jauh target yang telah tercapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Untuk melihat efektivitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

#### **1. Tabel Anggaran Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan**

Tabel 4.5

Penggunaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020

| NO | Program Kegiatan                                                                                                                                      | Anggaran        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Bantuan Peralatan Perikanan: pukot, timpa, tali nilon, mesin katinting.                                                                               | Rp. 20.792.000  |
| 2  | Bantuan Pertanian: mesin pompa, selang power, tong air, piber, sensor, mesin paras, bibit kacang tanah, bibit jagung, bibit rica, bibit bawang merah. | Rp. 92.317.000  |
| 3  | Bantuan Peternakan: bibit sapi bali.                                                                                                                  | Rp. 81.000.000  |
|    | Jumlah                                                                                                                                                | Rp. 194.109.000 |

Tabel 4.6

Penggunaan Anggaran Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021

| NO | Program Kegiatan                                     | Anggaran        |
|----|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Bantuan Peralatan Perikanan: pengadaan perahu piber. | Rp. 192.000.000 |
| 2  | Bantuan Pertanian: bibit rica, dan pupuk             | Rp. 29.890.000  |
|    | Jumlah                                               | Rp. 221.890.000 |

Tabel 4.7

Penggunaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022

| NO | Program Kegiatan                                                                        | Anggaran        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Bantuan Peralatan kelautan dan perikanan: pengadaan perahu piber.                       | Rp. 142.200.000 |
| 2. | Bantuan Pertanian: bibit bawang merah, bibit jagung, pupuk, tong piber, tengki semprot. | Rp. 59.995.000  |
| 3. | Pelatihan Bumdes                                                                        | Rp. 2.700.000   |
|    | Jumlah                                                                                  | Rp. 204.895.000 |

**2. Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan.**

Tabel 4.8

Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Tahun 2020

| No | Program Kegiatan                     | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) |
|----|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | Bantuan alat perikanan               | 20.792.000    | 20.792.000              | 0.00              |
| 2. | Peningkatan produksi tanaman pangan. | 92.317.000    | 92.128.000              | 189.000           |
| 3. | Peningkatan produksi peternakan.     | 81.000.000    | 79.650.000              | 1.350.000         |
|    | Jumlah                               | 194.109.000   | 192.570.000             | 1.539.000         |

Tabel 4.9

Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Tahun 2021

| No | Program Kegiatan                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:belanja bantuan perahu piber. | 192.000.000   | 189.600.000             | 2.400.000         |
| 2. | Sub Bidang Pertanian: Peningkatan produksi tanaman pangan.      | 29.890.000    | 28.840.000              | 1.050.000         |
|    | Jumlah                                                          | 221.890.000   | 218.440.000             | 3.450.000         |

Tabel 4.10

Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Tahun 2022

| No | Program Kegiatan                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Lebih/Kurang (Rp) |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:belanja bantuan perahu piber. | 142.200.000   | 141.750.000             | 450.000           |

|    |                                                                                                                  |             |             |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2. | Sub Bidang Pertanian: belanja bibit tanaman, dan pupuk. belanja bantuan peralatan tong piber dan tengki semprot. | 59.995.000  | 58.935.000  | 1.060.000 |
| 3. | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal: Pelatihan Bumdes.                                                           | 2.700.000   | 2.700.000   | 0.00      |
|    | Jumlah                                                                                                           | 204.895.000 | 203.385.000 | 1.510.000 |

### Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dapat di ketahui bahwa untuk proses perencanaan, pemerintah desa unu sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yaitu dengan melaksanakan musdus (musyawarah dusun), setelah musdus di lanjutkan dengan musdes (musyawarah desa) selanjutnya dilaksanakan penyusunan rencana kerja (RKPDDes) dan penetapan APBDes, ini harus di laksanakan untuk memaksimal- kan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dalam merencanakan pengelolaan dana desa untuk memberdayakan masyarakat, pent- ing untuk melibatkan masyarakat karena mereka berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan dan pertemuan desa yang disebut Musdus. Hasil analisis data tentang proses perencanaan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bisa di lihat bahwa untuk proses perencanaan, pemerintah desa unu sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ada, dengan melaksanakan musyawarah dusun, musyawarah desa dan sampai ke penyusunan AP- BDes dengan tujuan menggali gagasan-gagasan dari masyarakat untuk menghasilkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama dalam program pemberdayaan masyarakat.

### Pengorganisasian

Dapat di ketahui bahwa untuk pengorganisasian da- lam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa unu membuat tim TPK (Tim pelaksana kegiatan), tim ini di bentuk terdiri dari perangkat desa dan perwakilan masyarakat. TPK ini bertujuan untuk melaksanakan program-pro- gram yang telah di sepakati dengan masyarakat dalam musyawarah desa. Dalam pengorganisasian ada pembagian tugas serta tanggung jawab untuk memudahkan pencapaian tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengorganisasian pengelolaan dana desa, dalam pelaksanaan pem- berdayaan masyarakat, berdasarkan analisis data bahwa untuk proses pengorgan- isasian, pemerintah sudah melaksanakan dengan membuat TPK (tim pelaksana kegiatan), dengan tujuan untuk melaksanakan semua program-program kegiatan baik itu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam pengorganisasian ada hambatan yang di temukan yaitu adanya sebagian aparat desa yang belum mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang di berikan. Ini di sebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan akan ber- pengaruh terhadap pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

## **Pelaksanaan**

Dapat diketahui bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa unu sudah sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya dalam RKPDes dan APBDes serta di laksanakan oleh TPK (tim pelaksana kegiatan). Serta untuk pelaksanaan program pemberdayaan sudah sesuai yang di sepakati dengan masyarakat dalam musyawarah desa. Untuk hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yaitu masih kurangnya sumber daya manusia dari sebagian aparat desa hal ini di sebabkan oleh pendidikan aparat desa yang masih kurang, sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa seperti keterlambatan pencairan dana desa. Ini dapat menghambat proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Untuk evaluasi pemerintah desa unu sudah melakukan evaluasi dengan melaksanakan pertemuan bersama tim pelaksana kegiatan, BPD, dan masyarakat untuk melihat apakah pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai yang di rencanakan. Namun dalam kegiatan pelaksanaan monitoring belum berjalan maksimal, di sebabkan karena kesibukan pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas harian serta di pengaruhi sumber daya manusia masih kurang.

Berdasarkan hasil analisis data bahwa pemerintah desa unu sudah melaksanakan sesuai yang sudah di tetapkan dengan tahapan-tahapan yang sudah di rencanakan sebelumnya dalam RKPdes dan APBDes, setelah program pemberdayaan di tetapkan pemerintah melaksanakan kegiatan dengan tim pelaksana kegiatan (TPK) dengan melibatkan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat masih di temui kendala-kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dari sebagian aparat desa sehingga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa seperti keterlambatan pencairan dana desa, ini dapat meghambat untuk pelaksanaan program kegiatan. Serta monitoring terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih di katakan kurang di sebabkan karena kesibukan dari pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas harian dan masih di pengaruhi juga oleh sumber daya manusia yang kurang sehingga untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal.

## **Pengawasan**

Pemerintah desa unu sudah melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tetapi yang jadi yang jadi kendala di sini yaitu kurangnya masyarakat yang ikut mengawasi dalam pelaksanaan program yang ada. Ini di sebabkan masyarakat di desa unu masih banyak yang memilih bekerja serta masih banyak masyarakat yang menganggap untuk pengawasan hanya tugasnya pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa sudah berupaya menyampaikan tentang keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program-program yang di laksanakan tetapi hasilnya hanya sebagian masyarakat yang bisa mengerti, ini di sebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia.

Berdasarkan analisis data bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sudah di laksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Unu mulai dari perencanaan sampai ke penyusunan RKPDes dan APBDes serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Dalam pengawasan pengelolaan dana desa keterlibatan masyarakat sangat

di perlukan, namun berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa pemerintah sudah melibatkan masyarakat dalam pengawasan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, hal ini disebabkan karena kesibukan masing-masing masyarakat terhadap pekerjaan sehingga sangat sulit meluangkan waktu untuk memantau kegiatan-kegiatan yang di laksanakan, serta masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi setiap program-program yang dilaksanakan. Masyarakat masih menganggap bahwa pengawasan itu tugas dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dapat di tarik kesimpulan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan ada- lah sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di lihat dari perencanaan pengelolaan dana desa sudah terlaksana meskipun belum maksimal. Dalam perencanaan pemerintah desa unu sudah melaksanakan perencanaan dengan melaksanakan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang bertujuan untuk menggali gagasan dari masyarakat untuk program pemberdayaan masyarakat, tetapi yang menjadi kendala yaitu kurangnya partisipasi masyarakat da- lam musyawarah dusun dan musyawarah desa ini di sebabkan karena banyak masyarakat yang memilih bekerja di banding mengikuti musyawarah dusun dan musyawarah desa, sehingga berdampak pada kurangnya program pemberdayaan masyarakat di desa.
2. Dalam pengorganisasian pemerintah desa unu sudah melaksanakan dengan mem- bentuk TPK (tim pelaksana kegiatan) untuk melaksanakan program-program kegiatan. Tetapi ada kendala sebagian besar aparat desa belum mampu menyelesaikan tugas yang di berikan sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa unu sudah melaksanakan program kegiatan dengan TPK (tim pelaksana kegiatan) sesuai dengan yang di tetapkan dalam musyawarah desa. Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat masih terhambat dengan kurangnya sumber daya manusia dari sebagian besar aparat desa serta dalam kegiatan monitoring pelaksanaan program kegiatan masih belum maksimal di sebabkan karena kesibukan pemerintah desa dalam men- jalankan tugas harian.
4. Dalam pengawasan pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sudah melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, penyusunan RKPDes dan APBDes serta

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. tetapi yang menjadi kendala yaitu kurangnya masyarakat yang ikut mengawasi dalam kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

## **Bibliografi**

### ***Pustaka yang berupa judul buku***

- Miles & Huberman. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). In *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.).
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

### ***Pustaka yang berupa jurnal ilmiah***

- Christianingrum, R. (2022). Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa Dan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 100–113. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.52>
- Fisabilillah, F. F. N., Nisaaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 208. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1932>
- Indika, M., Marliza, Y., & Marisa, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Sistem Informasi* ..., 2(1).
- Kurniawan. A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Nurhayati, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12.
- Susanti, R., Arsa, A., & Hafiz, A. P. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(2), 202–218.